

Beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja, salah satu perusahaan yang membuat kebijakan tersebut adalah PT. Petrokimia Gresik. Perusahaan yang terdapat di kabupaten Gresik ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi pupuk untuk pertanian sehingga apabila dalam perusahaan ini mengalami masalah tentunya akan berdampak pada kebutuhan pangan di Indonesia.

Dengan keadaan demikian, masyarakat secara umum mengharapkan PT. Petrokimia Gresik terus berjaya dan tidak ada masalah yang dapat menurunkan kualitas produk perusahaan. Demi menjaga eksistensi, maka para pimpinan PT. Petrokimia Gresik tentunya akan memperhatikan hal sekecil apapun seperti membuat suatu kebijakan yang berfungsi untuk menghindari penurunan kualitas perusahaan. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi karyawan yang belum menjadi karyawan tetap.

Sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, para karyawan/karyawati PT. Petrokimia Gresik menjalani masa kontrak kerja/ program pemagangan selama beberapa tahun, dalam masa ini para pekerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan telah ditentukan jam kerja shift serta mendapat gaji dari perusahaan setiap bulannya.

Namun para karyawan/karyawati sebelumnya harus menyetujui surat perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik. Salah satu isi

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam “*Analisis Masalah Mursalah* terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Larangan menikah yang diterapkan dalam hukum Islam dan hukum Positif.
2. Perempuan yang dilarang dinikahi, larangan menikah terhadap perempuan baik yang bersifat selamanya maupun sementara.
3. Latar belakang berlakunya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik.
4. Tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan menikah yang disebabkan karena faktor profesi.
5. Akibat hukum yang diperoleh dari penerapan kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja.
6. Alasan diterapkan kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja oleh PT. Petrokimia Gresik.
7. Analisis *masalah mursalah* terhadap kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik.

Agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan fokus sebagai upaya menghindari kesimpangsiuran, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah yang meliputi:

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan tentang kebijakan larangan menikah di PT. Petrokimia Gresik yang terdiri dari deskripsi kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik, ruang lingkup kontrak kerja, alasan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik, dan implikasi dari kontrak kerja tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap data penelitian. Dalam bab ini akan diadakan analisis secara mendetail dengan menggunakan metode *masalah mursalah* terhadap kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.